

HASIL AUDIT, JABATAN GUBERNUR, KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Sarjono

Program Studi S1 Akuntansi STIE Ahmad Dahlan Jakarta/

Auditor BPK RI

E-mail: sarjono2299@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to analyze the factors that influence social welfare. The factors are audit opinion, financial performance, follow-up of audit recommendations, and the tenure of governors in the 34 provinces. The data used in this study is secondary data and in the form of panel data, and have been analyzed by multiple regression. The results showed that the financial performance and follow-up of audit recommendation have the positive and significant effect on social welfare. But, the audit opinion and the tenure of governor have negative and not-significant effect on social welfare.

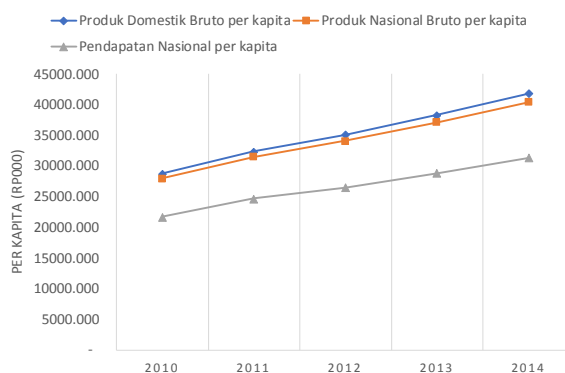
Kata Kunci: kesejahteraan sosial, opini audit, kinerja keuangan, rekomendasi audit, masa jabatan

PENDAHULUAN

Kesejahteraan merupakan dambaan setiap orang dan merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 ("....untuk memajukan kesejahteraan umum...") dan Pasal 28C ayat (1), Pasal 31 ayat (5), dan Pasal 34. Meskipun Indonesia telah melampaui era kemerdekaan lebih dari 70 tahun, masih banyak yang beranggapan bahwa sampai saat ini belum seluruh penduduk Indonesia menikmati hidup sejahtera.

Banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, di antaranya dengan mengalokasikan belanja di APBN/APBD untuk kepentingan masyarakat. Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*, pengeluaran pemerintah yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan ke-

sejahteraan sosial dan kesehatan meningkat dari tahun ke tahun (Sanz & Velazquez, 2007). Kesejahteraan rakyat Indonesia dapat digambarkan dari *income per capita* (Grafik 1).

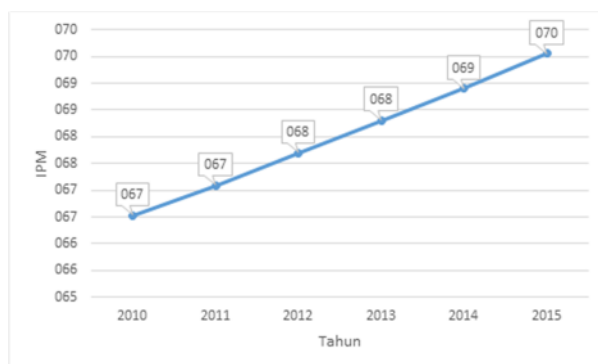


Sumber: BPS, 2015; diolah

Gambar 1. Perkembangan Pendapatan per Kapita Tahun 2010-2014 (Rp)

Di samping itu, tingkat kesejahteraan

masyarakat juga dapat tergambar dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) seperti tergambar dalam dalam Grafik 2. Studi tentang dampak pengeluaran public (*public expenditure*) terhadap IPM di Kota Tangerang pernah diteliti oleh Yandri (2012) yang berkesimpulan bahwa pengeluaran publik berdampak positif signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (IPM).



Sumber: BPS, 2015; diolah

Gambar 2. IPM Indonesia 2010-2015

Terwujudnya kesejahteraan tidak semata-mata tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi, berbagai pihak lain memiliki tanggung jawab untuk mewujudkannya. Dengan menggunakan perspektif *stakeholder theory* yang dikembangkan oleh Freeman (1984, 2004), Evan dan Freeman (1990), dan Friedman (2006), maka pihak-pihak yang harus terlibat dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat adalah pihak intern pemerintahan maupun pihak eksternal pemerintahan. Salah satu pihak eksternal adalah lembaga audit. Suatu lembaga audit memainkan peranan penting dalam mempertahankan kesejahteraan dan stabilitas masyarakat (Teck-Heang dan Ali, 2008).

Kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) merupakan gambaran keadaan seseorang atau sebuah keluarga yang hidup dalam keadaan *comfort* dan *happy*. Penduduk suatu negara dikatakan sejahtera atau tidak, salah satunya dapat dilihat dari ukuran apa yang disebut dengan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ukuran ini diperkenalkan oleh UNDP, yang didalamnya terkandung dimensi kesehatan, pen-

didikan, dan standar hidup yang layak (UNDP, 2002). Pertanyaan yang sering muncul adalah "siapa yang bertanggung jawab atas pemenuhan kesejahteraan masyarakat?" Untuk menjawab hal tersebut, dapat menggunakan pendekatan "*stakeholder theory*".

Definisi awal atau tradisional dari *stakeholder* adalah "*any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organization's objectives*" (Freeman, 1984). Organisasi harus dianggap sebagai pengelompokan *stakeholder* dan tujuan organisasi harus dibentuk untuk mengelola kepentingan, kebutuhan, dan sudut pandang mereka (Friedman, 2006). Selanjutnya definisi *stakeholder* berkembang menjadi "*those groups who are vital to the survival and success of the corporation*" (Freeman, 2004).

Friedman (2006) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang jelas antara definisi *stakeholder* dengan identifikasi siapa mereka. Kelompok utama dari *stakeholder* adalah pelanggan, pegawai, komunitas lokal, penyedia barang dan distributor, dan pemegang saham. Di samping itu, terdapat kelompok atau individu lain yang dapat dipertimbangkan sebagai *stakeholder*, yaitu media, masyarakat umum, mitra bisnis, generasi mendatang, generasi sebelumnya (pendiri organisasi), akademisi, kompetitor, aktivis atau LSM, serikat dagang atau asosiasi, lembaga keuangan, pemerintah, pembuat undang-undang dan kebijakan.

Evan dan Freeman (1990) membangun teori normatif yang didasarkan pada definisi *stakeholder* "*those groups who are vital to the survival and success of the corporation*" Kelompok yang dimaksud adalah pelanggan, pegawai, pemasok, masyarakat, pemegang saham, dan manajer. Mereka mengemukakan dua prinsip yaitu: pertama, *principle of corporate legitimacy*. Perusahaan harus dikelola untuk keuntungan para *stakeholder*-nya. *Stakeholder* harus berpartisipasi dalam keputusan yang secara substansial mempengaruhi kesejahteraannya.

Kedua, *the stakeholder fiduciary principle*.

Manajer harus bertindak dalam kepentingan *stakeholder* sebagai agen mereka dalam kepentingan korporasi untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Berkaitan dengan hubungan para *stakeholder*, Friedman dan Miles (2002) menyajikan tipologi hubungan organisasi *stakeholder* berdasarkan atas dua perbedaan yaitu: (1) *compatible* atau *incompatible*; dan (2) *necessary* atau *contingent*.

Dalam lingkungan pemerintah daerah, dengan mendasarkan *stakeholder theory* yang ada, *stakeholder* dimaknai sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemerintah daerah seperti masyarakat, anggota (pegawai dan pejabat) organisasi pemda, lembaga perwakilan, penyedia barang dan jasa untuk pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, dan lembaga audit. Masing-masing *stakeholder* memiliki peran untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dapat menjalankan kebijakan dan programnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pada akhirnya mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Pemerintah daerah mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya melalui laporan keuangan yang diaudit oleh lembaga audit eksternal. Audit atas laporan keuangan merupakan bentuk jasa attestasi dimana auditor menerbitkan laporan tertulis yang berisi opini mengenai apakah laporan keuangan disajikan secara wajar berdasarkan standar akuntansi yang berlaku (Arens *et al*, 2012). Menurut UU No. 15/2004, opini adalah “pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa (auditor) mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan”.

Definisi tersebut didasarkan pada kriteria: (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa (auditor), yakni (1) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (2) opini

wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (3) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (4) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Dalam konteks dunia akademik, penelitian tentang pengaruh opini audit terhadap kesejahteraan masyarakat masih sangat sedikit. Adzani dan Martani (2014) misalnya meneliti hubungan antara kesejahteraan masyarakat (yang diukur dengan IPM) dengan opini LKPD yang menunjukkan adanya dampak positif. Dalam sektor perusahaan atau swasta, kesejahteraan digambarkan dalam bentuk capaian rasio profitabilitas dan kinerja perusahaan. Penelitian oleh Ziaee (2014) menunjukan adanya pengaruh positif antara opini audit dengan kinerja perusahaan.

Peranan audit telah berevolusi seiring dengan perkembangan jaman. Menurut Teck-Heang dan Ali (2008), pada pertengahan tahun 1800-an sampai awal 1900-an, praktek audit dianggap sebagai “*traditional conformance role of auditing*”. Akan tetapi, dalam 30 tahun terakhir, auditor telah memainkan “*enhancing role*”. Hari ini, auditor diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, tetapi juga menyediakan “*value-added services*”.

BPK, sebagai satu-satunya lembaga audit eksternal pemerintahan menurut Pasal 23E UUD 1945, melakukan audit dalam tiga jenis yaitu audit laporan keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu. Dalam ketiga jenis audit tersebut, auditor BPK harus melaksanakan prosedur audit kepatuhan, yang outputnya adalah temuan kepatuhan. Salah satu temuan kepatuhan adalah berkaitan dengan indikasi kerugian negara/daerah dalam bentuk kelebihan pembayaran atau kekurangan penerimaan karena adanya kecurangan (*fraud*).

Kecurangan di bidang keuangan merupakan salah satu bentuk korupsi, dan korupsi memiliki pengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat (Lambsdorff, 2001). Selain itu, penelitian Mangkunegara (2015) mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan BPK (nilai

temuan yang berindikasi kerugian negara/ daerah) berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, menurut Boeker (1997), masa jabatan dalam suatu organisasi akan mempengaruhi kognitif seorang eksekutif. Strategi seorang pemimpin diantaranya dipengaruhi oleh masa jabatan. Seba *et al* (2009) menyatakan bahwa pimpinan dengan masa jabatan panjang cenderung memiliki strategi bertahan (*defending*), sedangkan pemimpin dengan masa jabatan pendek akan lebih memiliki menggunakan strategi *prospector*. Gaya kepemimpinan akan menentukan kesuksesan suatu negara untuk mensejahterakan masyarakatnya (Kurfi, 2009 dalam Gatut, 2013).

Gaya suatu pemimpin daerah akan tercermin dalam kebijakan yang dipilih dan diimplementasikan dalam bentuk program atau kegiatan selama dia menjabat. Semakin lama menjabat, akan semakin tampak bagaimana seorang kepala daerah memimpin lembaga pemerintahannya. Bagaimana seorang kepala daerah merencanakan, menganggarkan, dan merealisasikan program dan kegiatan dalam APBD, sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinannya. Namun demikian, studi Mahardini (2014) menyatakan bahwa masa jabatan kepala dari tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah (Pasal 1 UU. No. 23/2014). Masa jabatan kepala daerah adalah selama lima tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan (Pasal 60 UU. No. 23/2014). Kepala daerah memiliki kewajiban untuk berbakti kepada "masyarakat, nusa, dan bangsa" yang diucapkan dalam bentuk sumpah atau janji ketika dilantik (Pasal 61 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014).

Kepala daerah memiliki tugas yang ber-

kaitan dengan masyarakat sebagai salah satu *stakeholder*-nya, antara lain: (1) memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; (2) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; (3) menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD; dan (4) menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama (Pasal 65 ayat (1) UU. No. 23/2014).

Realisasi pelaksanaan tugas kepala daerah yang berkaitan dengan masyarakatnya tersebut diwujudkan dalam bentuk program/kegiatan dan didukung dengan anggaran belanja untuk membiayai program/kegiatan tersebut. Anggaran belanja dituangkan dalam APBD setiap tahun dengan mengacu pada kebijakan umum anggaran yang merupakan dokumen kesepakatan antara kepala daerah dan lembaga perwakilan (DPRD). Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja dalam APBDnya untuk masyarakat melalui belanja yang langsung diserahkan kepada masyarakat seperti bantuan sosial dan belanja hibah.

Di samping itu, pemerintah daerah juga merealisasikan belanja tidak langsung diserahkan kepada masyarakat tetapi melalui program atau kegiatan yang melibatkan masyarakat (seperti program pemberdayaan) sehingga diharapkan masyarakat memiliki keterampilan yang lebih. Kedua belanja tersebut memiliki tujuan sama yaitu dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Sucipto (2003), kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam meng-

hasilkan laba. Berdasarkan PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 pasal 1 ayat 37 (perubahan kedua dari Permendagri No. 13 Tahun 2006), kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Kanbur dan Squire (1999) menjelaskan bahwa kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk kepentingan masyarakat miskin dapat mengurangi kemiskinan yang terjadi. Penelitian Franciari dan Sugiyanto (2013) juga menunjukkan adanya hubungan negatif antara kapasitas fiskal pemerintah daerah dengan tingkat kemiskinan. Dengan kata lain, semakin tinggi kinerja keuangan daerah (semakin tinggi realisasi PAD), pemerintah daerah akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan (menuju sejahtera).

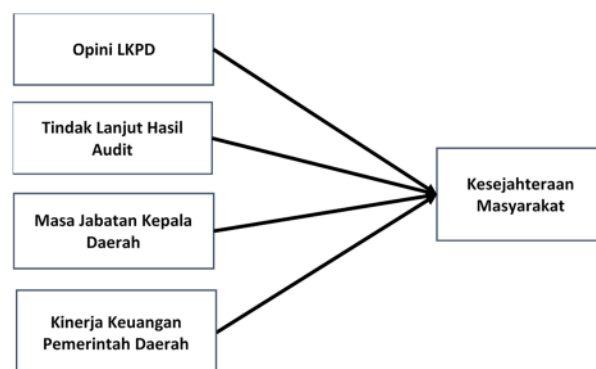
TUJUAN

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah, masa jabatan kepala daerah (gubernur), tindak lanjut rekomendasi hasil audit BPK, dan kinerja keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu lembaga audit eksternal pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyusun program yang tepat sesuai kewenangannya sehingga output yang dihasilkan memiliki dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

METODE

Penelitian ini mengeksplorasi pengaruh dari opini laporan keuangan pemerintah daerah, tindak lanjut rekomendasi hasil audit

BPK, kinerja keuangan daerah, dan masa jabatan kepala daerah terhadap kesejahteraan masyarakat yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (Gambar 3).



Gambar 3. Kerangka Pemikiran Penelitian

Teknik analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan deskriptif. Data penelitian ini diambil dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang diterbitkan tahun 2015, baik LHP atas Laporan Keuangan Daerah Tahun 2014, Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja, maupun Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu. Sesuai dengan tujuan penelitian, sampel dipilih dari LHP atas entitas pemeriksaan Pemerintah Provinsi.

Sementara data masa jabatan kepala daerah (gubernur) diperoleh dari website Kementerian Dalam Negeri dan kanal Wikipedia. Selanjutnya, data terkait dengan laporan keuangan daerah (*audited*) tahun 2015 diambil dari kanal masing-masing pemerintah provinsi dan/atau dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun 2015 (Buku I) yang telah diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah. LHP BPK dapat diperoleh di perpustakaan BPK. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2015 diperoleh dari laman Badan Pusat Statistik (BPS).

Penelitian ini menggunakan analisis jalur dengan model regresi untuk mengevaluasi pengaruh dari opini laporan keuangan pemerintah daerah tahun sebelumnya

(OpiniLK_{ti-1}), tindak lanjut rekomendasi hasil audit BPK (TL_Audit_Gab_{ti-1}), dan masa jabatan kepala daerah (MasaKerGub_{ti}) kinerja keuangan daerah (KinerjaKeuDa_{ti}) terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM_{ti}) yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia. Model yang dikembangkan adalah sebagai berikut.

$$IPM_{ti} = \alpha + \beta_1 OpiniLK_{ti-1} + \beta_2 TL_Audit_Gab_{ti-1} + \beta_3 MasaKerGub_{ti} + \beta_4 KinerjaKeuDa_{ti} + \varepsilon_t$$

Keterangan:

IPM _{ti}	:	Indeks Pembangunan Manusia pada tahun ke- <i>t</i> Pemda ke- <i>i</i>
α	:	Konstanta
β ₁ – β ₄	:	Koefisien regresi untuk variabel independen
OpiniLK _{ti}	:	Opini BPK atas LKPD pada tahun ke- <i>t</i> Pemda ke- <i>i</i>
MasaKerGub _{ti}	:	Masa kerja kepala daerah (gubernur) pada tahun ke- <i>t</i> Pemda ke- <i>i</i>
KinerjaKeuDa _{ti}	:	Kinerja Keuangan Daerah
ε	:	Koefisien galat pada tahun ke- <i>t</i> Pemda ke- <i>i</i>

Data diolah dengan menggunakan bantuan program SPSS, dengan urutan proses sebagai berikut:

1. Masing-masing model dilakukan Uji *Goodness of Fit* yang memiliki tujuan untuk mengetahui apakah suatu variabel bisa didekati menggunakan distribusi atau tidak. Hasil uji ditunjukkan dengan membandingkan nilai *F* pada Tabel Anova dengan *F*_{tabel} atau membandingkan dengan nilai signifikansi (sig.) dengan taraf signifikansi. Jika nilai *F* > *F*_{tabel} atau nilai sig. < taraf signifikansi (0,05), maka model dapat diolah lebih lanjut.
2. Selanjutnya dilakukan uji *t* untuk model

penelitian. Suatu variabel independen memiliki pengaruh signifikan jika nilai *t*_{hitung} > *t*_{tabel} atau nilai sig. < taraf signifikansi (0,05).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh opini audit, tindak lanjut hasil audit, kinerja keuangan daerah, dan masa jabatan kepala daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di 34 provinsi, terlebih dahulu dilakukan penaksiran model regresi data panel.

Tabel 1. Hasil Uji Regresi

Keterangan	β	<i>t</i> _{hitung}	Sig	VIF
Constant	56.383	16.906	0,000	--
OpiniLK	-0,265	-.391	0,699	1.483
TL_Audit_Gab	3,296	2.206	0,035	1.241
KinerjaKeuDa	3,517	5.293	0,000	1.059
MasaKerGub	-0,088	-.390	0,700	1.262
FSig	:	0,000		
R	:	0,750		
R Square	:	0,563		
Adjusted R Square	:	0,503		
DW	:	2,047		

Sumber: data diolah, 2015

Hasil regresi diperoleh R² sebesar 0,564 (Tabel 1). Hal ini berarti tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dijelaskan oleh variabel opini LKPD, tindak lanjut rekomendasi hasil audit BPK, kinerja keuangan daerah, dan masa jabatan kepala daerah sebesar 56,40%. Sedangkan sisanya sebesar 43,60% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Pengujian pertama adalah menguji *the Goodness of Fit model* atau uji kelayakan model, yaitu mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual. Secara statistik uji *Goodness of Fit* dapat dilakukan melalui pengukuran nilai koefisien determinasi, nilai statistik *F* dan nilai statistik *t* atau *t*_{hitung} (Cooper & Schindler, 2014).

Berdasarkan hasil pengolahan data melalui regresi linier, diperoleh nilai *F*_{hitung} sebesar

9,347 dan Sig. F sebesar 0,000. Sedangkan F_{tabel} dengan $df_1=4$, $df_2=29$, dan probabilitas 0,05 diperoleh angka 2,70. Dengan demikian F_{hitung} (9,347) > F_{tabel} (2,70) dan Sig. F (0,000) < probabilitas (0,05). Hal ini berarti bahwa semua variabel bebas (independen) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat atau variabel dependen.

Tabel 1 menunjukkan pengaruh masing-masing variabel independen (tindak lanjut rekomendasi hasil audit, kinerja keuangan daerah, dan masa kerja kepala daerah) terhadap variabel dependen (kesejahteraan masyarakat). Interpretasi hasil uji statistik regresi masing-masing variabel adalah sebagai berikut.

Variabel OpiniLK memiliki nilai *t-statistic* sebesar -0,391 (lebih besar dari *t-tabel*: -2,04523) dengan nilai signifikansi sebesar 0,699 (lebih besar dari tingkat keyakinan 5% atau 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel opini LKPD yang diberikan oleh BPK memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM). Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Ziaee (2014) di sektor korporasi yang menyatakan adanya pengaruh positif antara opini audit terhadap kinerja perusahaan.

Hasil ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akib, *et al* (2016) pada pemerintah di Sulawesi Tenggara yang menyatakan bahwa opini audit memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (yang diukur dengan IPM). Perbedaan hasil penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, misalnya karena perbedaan karakteristik dari unit analisis atau opini audit berpengaruh terhadap kesejahteraan tidak secara langsung, tetapi melalui upaya pencegahan kecurangan atau fraud (Chen *et al*, 2013).

Variable TL-Audit_Gab memiliki nilai *t-statistic* sebesar 2,206 (lebih besar dari *t-tabel*: 2,04523) dan nilai signifikansi sebesar 0,035. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tindak lanjut

hasil audit BPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM) dengan tingkat keyakinan 95% (nilai sig tidak lebih dari 5% atau 0,05). Artinya, semakin tinggi tingkat (prosentase) tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan BPK kepada pemerintah provinsi akan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

Tindak lanjut yang dimaksud di sini adalah nilai temuan audit yang berindikasi kerugian negara/daerah (seperti dalam bentuk kekurangan penerimaan daerah, kelebihan pembayaran, kekurangan volume pekerjaan, dan pekerjaan fiktif) yang telah dipulihkan oleh pemerintah daerah melalui penyetoran uang ke Bendahara Umum Daerah (BUD). Hal ini mengkonfirmasi penelitian yang dilakukan oleh Lambsdorff (2001) bahwa temuan audit memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, jika hanya menguji besarnya nilai temuan audit, maka akan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Mangkunegara, 2015). Oleh karena itu, ketika laporan hasil audit BPK memuat temuan berindikasi kerugian negara/daerah maka kepala daerah harus segera melakukan pemulihan dengan cara menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Menurut Pasal 20 ayat (5) UU. No. 15/2004, tindak lanjut harus dilaksanakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil audit BPK diterima.

Variabel KinerjaKeuDa memiliki nilai *t-statistic* sebesar 5,293 (lebih besar dari *t-tabel*: 2,04523) dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kinerja keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM) dengan tingkat keyakinan 95% (nilai sig tidak lebih dari 5% atau 0,05). Hasil penelitian ini sejalan dengan kesimpulan penelitian Kanbur dan Squire (1999) dan Franciari dan Sugiyanto (2013). Kinerja keuangan daerah diukur dengan rasion kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio aset bersih, dan rasio efisiensi. Artinya, semakin tinggi tinggi keempat rasio tersebut akan semakin besar

kontribusi keuangan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan porsi pendapatan asli daerah (yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD lainnya) terhadap dana transfer dan tercapainya realisasi PAD akan memberikan peluang yang lebih bagi pemerintah provinsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemerintah provinsi harus terus-menerus mencari cara yang tepat dalam upaya meningkatkan porsi PAD-nya sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam bentuk dana transfer dapat berkurang secara bertahap.

Variabel *MasaKerGub* memiliki nilai *t-statistic* sebesar -0,390 (lebih besar dari *t-tabel*: -2,04523) dengan nilai signifikansi sebesar 0,700 (lebih besar dari tingkat keyakinan 5% atau 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel masa kerja kepala daerah memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM). Hal ini menunjukkan bahwa lamanya kepala daerah (gubernur) menjabat di suatu provinsi tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mahardini (2014). Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan dimensi atau indikator atas variabel kepemimpinan kepala daerah (gubernur), tidak hanya faktor masa jabatan, tetapi dikembangkan ke indikator lain seperti gaya kepemimpinan, komitmen, kegigihan, dan sikap ketika menghadapi risiko (Adnan, 2011).

Pada penelitian-penelitian sebelumnya, jabatan kepala daerah memiliki pengaruh signifikan jika dikaitkan dengan variabel lain yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Misalnya, masa jabatan kepala pemerintahan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja fiskal pemerintah (Hayo dan Neumeier, 2014), gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi (Koech dan Namusonge, 2012; Idrus *et al*, 2014), kepala daerah dengan luasan wilayah lebih besar

memiliki kondisi yang lebih banyak untuk meningkatkan kinerja keuangannya (Gomes *et al*, 2013).

KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini telah dapat dijawab dan disimpulkan sebagai berikut.

1. Opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang diberikan oleh BPK tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Tindak lanjut hasil audit BPK berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
3. Kinerja keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
4. Masa jabatan kepala daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hanya variabel tingkat tindak lanjut rekomendasi hasil audit BPK dan kinerja keuangan daerah yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, sedangkan dua variabel lainnya (tingkat opini audit atas LKPD dan masa kerja jabatan kepala daerah) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Implikasi dari penelitian ini adalah pemerintah daerah yang berorientasi menyejahterakan masyarakat hendaknya menganggap setiap rekomendasi hasil audit BPK menjadi prioritas untuk ditindak-lanjuti. Rekomendasi hasil audit BPK umumnya berkaitan dengan perbaikan pengendalian internal, peningkatan kapasitas manajemen, dan pemulihan kerugian daerah. Selanjutnya, untuk dapat mengakselerasi pencapaian kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah juga meningkatkan kemandirian keuangan daerah, efisiensi dan efektivitas, serta aset bersih yang dimilikinya.

Penelitian yang mengkaitkan langsung antara tingkat opini yang dicapai laporan keuangan pemerintah daerah dan masa jabatan kepala daerah dengan kesejahteraan masyarakat masih sangat sedikit. Oleh karena itu, untuk penelitian berikutnya masih diperlukan perbaikan indikator yang dipakai untuk mengukur variabel tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M, 2011, 'Kajian Kepemimpinan Walikota Pekalongan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat', *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 2, No. 2: 78-82.
- Adzani, Akhmad, H., dan Dwi Martani, 2014, *Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat, Faktor Politik dan Ketidapatuhan Regulasi Terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Prosiding Seminar Nasional Akuntansi ke 17 Mataram, Lombok, 24-27 September.
- Aikins, SK, 2011, 'An Examination of Government Internal Audits' Role in Improving Financial Performance', *Public Finance and Management*, Volume 11, Number 4: 306-337.
- Akib, M, Habbe, AH, Rura, Y dan Hakim, A, 2016, 'Relationship Good Governance with Welfare Society Mediated by Local Government Financial Disclosure and Audit Report Opinion (Study on Local Government Southeast Sulawesi)', *International Journal of Science and Research (IJSR)*, Volume 5, Issue 2, February: 789-800.
- Arens, AA., Elder, RJ, dan Beasley, MS, 2012, *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*, 14th Edition, Prentice Hall, New York.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2016, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Tahun 2015
- Badan Pusat Statistik, 2016, 'Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi, 2010-2015 (Metode Baru)', *Diunduh pada 11 Oktober 2016*, <<http://www.bps.go.id>>
- Boeker, W., 1997, 'Strategic Change: The Influence of Managerial Characteristics and Organizational Growth', *The Academy of Management Journal*, Vol. 40, No. 1 (Feb): 152-170.
- Chen, J, Cumming, D, Hou, W dan Lee, E, 2013, 'Executive integrity, audit opinion, and fraud in Chinese listed firm', *Emerging Markets Review*, Vol. 15: 72-91.
- Cooper, DR & Schindler, PS, 2014, *Business Research Methods*, Twelfth Edition, McGraw-Hill/Irwin, New York.
- Franciari, PS dan Sugiyanto, FX, 2013, 'Analisis Hubungan IPM, Kapasitas Fiskal, dan Korupsi terhadap Kemiskinan di Indonesia (Studi Kasus 38 Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2008 dan 2010)', *Diponegoro Journal of Economics*, Volume 2, Nomor 2: 1-14.
- Freeman, RE, 1984, *Strategic Management: A stakeholder Approach*, Pitman, Boston, MA.
- Freeman, RE, 1999, 'Response: Divergent Stakeholder Theory', *Academy of Management Review*, Vol. 24, Mo. 2: 233-236.
- Freeman, RE, 2004, 'A Stakeholder Theory of Modern Corporations', *General Issue in Business Ethics*: 38-48.
- Freeman, RE dan Evan, WM, 1990, 'Corporate Governance: A Stakeholder Interpretation', *The Journal of Behavioral Economics*, Volume 19, Number 4: 337-359.
- Friedman, AL dan Miles, S, 2002. 'Developing Stakeholder Theory', *Journal of Management Studies*, Vol. 39, No. 1, January: 1-21.
- Gatut, B, 2013, 'Individual Business and Leadership weaknesses consequences on Society Welfare and Poverty Formation', *Studies in Business & Economics*, Vol. 8 Issue 1: 11-19.

- Gomes, RC, Alfinito, S dan Albuquerque, PHM, 2013, 'Analyzing Local Government Financial Performance: Evidence from Brazilian Municipalities 2005-2008', *Revista de Administração Contemporânea (RAC)*, Vol. 17, No. 6: 704-719.
- Halim, A dan Kusufi, S, 2012, *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*, Salemba Empat, Jakarta.
- Hayo, B dan Neumeier, F, 2014. 'Political leaders' socioeconomic background and fiscal performance in Germany', *European Journal of Political Economy*, Vol. 34: 184-205.
- Idrus, A, Armany, Sudiro, A dan Rohman, F, 2016, 'The Influence Of Bureaucratic Leadership, Organizational Culture And Organizational Commitment Of Organizational Performance (A Study on SKPD Financial Managers in Jayapura Government)', *Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business*, Vol, 5, No, 11: 189-201.
- Kanbur, R dan Squire, L, 1999, 'The Evolution of Thinking about Poverty: Exploring the Interactions', Diunduh pada 30 Oktober 2016, <<http://siteresources.worldbank.org/INTPOVERTY/Resources/WDR/evolut.pdf>>
- Koech, PM dan Namusonge, GS, 2012, 'The Effect of Leadership Styles on Organizational Performance at State Corporations in Kenya', *International Journal of Business and Commerce*, Vol. 2, No. 1, September: 1-12.
- Lambsdorff, JG, 2001, 'How Corruption in Government Affects Public Welfare - A Review of Theories', Discussion Paper 9, Center for Globalization and Europeanization of the Economy, Georg-August-Universität Göttingen, January.
- Mahardini, NY, 2014, 'Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia dengan Lokasi Pemerintahan, Jumlah Populasi dan Besarnya APBD sebagai Variable Kontrol' Tesis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Mangkunegara, I, 2015, 'Pengaruh Karakteristik Keuangan dan Hasil Pemeriksaan pada Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara', *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, Vol. 1, No. 1, Desember: 141-155.
- Sanz, I dan Velazquez, FJ, 2007, 'The role of ageing in the growth of government and social welfare spending in the OECD', *European Journal of Political Economy*, Vol. 23: 917-931.
- Sebaa, AA, Wallace, J dan Cornelius, N, 2009, 'Managerial Characteristics Strategy and Performance in Local Government', *Measuring Business Excellence*, Vol. 13 No. 4: 12-21.
- Sucipto, 2003, 'Penilaian Kinerja Keuangan', Diunduh 12 November 2016, USU Digital Library, <<http://library.usu.ac.id/download/fe/akuntansi-sucipto.pdf>>
- Teck-Heang, L dan Ali, AM, 2008, 'The evolution of auditing: An analysis of the historical development', *Journal of Modern Accounting and Auditing*, Vol. 4, No. 12 (Serial No. 43): 1-8
- UNDP, 2002, *Human Development Report 2002: Deepening democracy in a fragmented world*, Oxford University Press, New York.
- Wikipedia, 2016, 'Daftar Gubernur', Diunduh pada 29 Oktober 2016, <<https://id.wikipedia.org>>
- Yandri, P., 2012, Autonomy Policy and Social Welfare in Tangerang City, *Economic Journal of Emerging Markets*, April 2012, 4(1): 52-62.
- Ziaee, M, 2014, 'The effect of audit quality on the performance of listed companies in Tehran Stock Exchange', *International Letters of Social and Humanistic Sciences*, Vol. 21: 36-43.